

ABSTRAK

Putri Dwi Susanto. NIM 1188040058. 2022: Implementasi Kesetaraan Gender dan Affirmative Action dalam Mendorong Keterwakilan Politik Perempuan (Studi Kasus Anggota Parlemen Perempuan di DPRD Kabupaten Sumedang Periode 2019-2024).

Kehadiran perempuan dalam politik memiliki tingkat kuantitas yang masih minim. *Affirmative action* 30% dapat menjawab tantangan dari persoalan peningkatan keterwakilan perempuan. Namun, kebijakan *affirmative action* ini belum memberikan output yang signifikan di Indonesia bagi keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif. Banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi.

Fokus penelitian ini ialah berfokus pada representatif keterwakilan politik perempuan di DPRD Kabupaten Sumedang, dengan tujuan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan keterwakilan perempuan dalam politik masih minim. Kemudian bagaimana implementasi kesetaraan gender dan *affirmative action* dilakukan oleh partai politik untuk memenuhi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Penelitian ini menggunakan Teori keterwakilan politik perempuan Anne Phillips yang membaginya kedalam dua kategori yaitu politik gagasan (*politics of idea*) dan politik kehadiran (*politics of present*). Berdasarkan Teori Keterwakilan Politik Perempuan Anne Phillips, peneliti merelevansikan dengan fenomena yang ada di DPRD Kabupaten Sumedang terkait dengan keterwakilan politik perempuan diranah legislatif melalui dua kategori yang digagas oleh Anne Phillips.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara kepada anggota parlemen DPRD Kabupaten Sumedang dan pihak terkait dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, faktor-faktor minimnya keterwakilan politik perempuan di DPRD Kabupaten Sumedang yaitu karena politik terbuka, segi finansial, segi kekuatan dan konstruk pemikiran yang bias gender terhadap kaum perempuan dari masyarakat. Kemudian kedua, implementasi kesetaraan gender di DPRD Kabupaten Sumedang direalisasikan dengan hadirnya Kaukus Perempuan Parlemen Kab. Sumedang serta adanya program kerja yang ramah gender. Selain itu implementasi *affirmative action* 30% terealisasi oleh setiap partai politik pada tahap pencalonan peserta pemilu, dibuktikan dengan setiap partai politik menyertakan keterwakilan kader perempuan melebihi angka 30%. Meskipun realitanya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sumedang periode 2019-2024 masih belum mencapai angka 30%.

Kata Kunci: Politik Perempuan, Kesetaraan Gender, *Affirmative Action*